

---

**TAHUNAN 2015**  
**LAPORAN BPK**  
**PERWAKILAN**  
**PROVINSI**  
**JAWA BARAT**

---

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



**Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

## NILAI - NILAI DASAR

### *Independensi*

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

### *Integritas*

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

### *Profesionalisme*

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

## LAMBANG BPK

BPK telah mengalami empat kali perubahan lambang. Setiap lambang memiliki arti dan makna tersendiri. Pada periode 1961 - 1973, lambang BPK terdiri dari pena emas dan buku, peta Indonesia, api, dan timbangan. Pena emas dan buku berarti BPK melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara, peta Indonesia menunjukkan luasnya wilayah pemeriksaan BPK. Api berarti pemeriksaan dilakukan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi lebih ditujukan kepada pemberian pembinaan pengarahannya. Timbangan berarti pemeriksaan bersifat adil, independen, dan objektif.

Pada periode 1973 - 1983, lambang BPK diubah menjadi tiga tanda panah yang saling berhubungan. Lambang ini menggambarkan bahwa BPK yang lahir pada 1 Januari 1947, merupakan lembaga tinggi yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan program. Ketiga macam pemeriksaan tersebut selalu didasarkan pada hukum dan keadilan dengan motto tepat, cermat, dan hemat.

Pada periode 1985 - 1993, lambang BPK diubah kembali menjadi berbentuk bulat dan terdiri dari Garuda Pancasila yang terletak di tengah lingkaran Cakra. Ini melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi Negara yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara, sebagai dasar landasan idiil dan filosofis dari setiap tindakan yang diambil BPK.

Perubahan terakhir lambang BPK pada tahun 1993 dan masih digunakan hingga saat ini adalah Tri Dharma Arthasantosa. Tulisan tersebut bermakna misi BPK dalam mencapai tiga keberhasilan, yaitu ketaatan dan ketertibian dalam administrasi keuangan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pencapaian sasaran program, guna terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Negara yang semakin sempurna.

Pemilihan Cakra, lambang senjata Betara Wisnu, merupakan gambaran harapan agar BPK dapat menjadi institusi yang ampuh dalam menjaga pengelolaan keuangan negara, sebagaimana senjata tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Bunga teratai berkelopak tujuh yang menopang cakra, dikenal sebagai Padsama. Tahta bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian, dan keluhuran lahir batin, sedangkan tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing berjumlah tujuh butir. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK, yaitu ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis), serta keefektifan hasil program.

### Transformasi Lambang BPK



**Lambang BPK**  
Periode 1961 s.d. 1973



**Lambang BPK**  
Periode 1973 s.d. 1983



**Lambang BPK**  
Periode 1985 s.d. 1993



**Lambang BPK**  
Periode 1993 s.d. Skrg

## 7 ANGGOTA BPK



Foto dari kiri ke kanan : Anggota VII BPK - Achsanul Qosasi, Anggota II BPK - Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., Anggota II BPK - Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., Wakil Ketua BPK - Drs. Supto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A., Ketua BPK - Dr. Harry Azhar Azis, M.A., Anggota IV BPK - Prof. Dr. H. Rizal Djailil, M.M., Anggota V BPK - Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA., Anggota III BPK - Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, SE., Ak., M.M., Anggota VI BPK - Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

## BIDANG TUGAS ANGGOTA BPK



**Ketua BPK RI**  
**Dr. Harry Azhar Azis, MA.**

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum, dan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

### Wakil Ketua BPK RI

**Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., CA.**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Secara Umum, Pembinaan Tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, Pembinaan Pemeriksaan Investigatif dan Pembinaan Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.



**Anggota I BPK**  
**Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



**Anggota II BPK**  
**Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



**Anggota III BPK**  
**Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, SE., Ak., M.M.**

Bidang Tugas : Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan



Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi, serta melaksanakan koordinasi Pemeriksaan Investigatif.

**Anggota IV BPK**  
**Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur, serta memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



**Anggota V BPK**  
**Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA.**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa), dan memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



**Anggota VI BPK**  
**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.**

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), dan memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



**Anggota VII BPK**  
**Achsanul Qosasi**

Bidang Tugas : Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga lain yang dibentuk yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, dan memberikan pengarahannya Pemeriksaan Investigatif.



## *MARS BPK*

*Wahai Sang Abdi Negara  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Hayatilah dan Amalkan Pengabdianmu  
Dengan Menjunjung Tinggi Independensi  
Integritas dan Profesionalisme  
Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara*

*Demi Bangsaku Indonesia  
Tanah Air Tercinta  
Kami Siap Jiwa dan Raga  
Mengabdikan Untuk Negara  
Tegar*

*Takkan Gentar  
Menjaga Mengayomi Harta Negara  
Dengan Semangat Pancasila  
(Kembali Ke Awal)*

*Dengan Semangat Pancasila*

## *HYMNE BPK*

*Kami Sang Abdi Negara  
Mengemban Tugas Mulia  
Untuk Tanah Air Tercinta  
Demi Bangsaku Indonesia*

*Kami Siap Jiwa dan Raga  
Mengabdikan Untukmu Negara  
Tegar Takkan Pernah Gentar  
Menjaga Harta Negara  
Dengan Semangat Pancasila*

*Kami Sang Abdi Negara  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Bersumpah Dengan Hati yang Kuat  
Selalu Ada Untukmu Indonesia*

*(REF)*

*Kami Siap Jiwa dan Raga  
Mengabdikan Untukmu Negara  
Tegar Takkan Pernah Gentar  
Menjaga Harta Negara  
Dengan Semangat Pancasila  
(BACK TO REF)*

*Dengan Semangat Pancasila (2 x)*

## VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

## MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;  
Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan  
Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

## TUJUAN STRATEGIS

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan  
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

# DAFTAR ISI

## Bagian I

<b>Halaman</b>	<b>2  </b>	<b>Nilai - Nilai Dasar</b>
	<b>3  </b>	<b>lambang BPK</b>
	<b>4  </b>	<b>Pimpinan BPK</b>
	<b>5  </b>	<b>Bidang Tugas Pimpinan BPK</b>
	<b>6  </b>	<b>Himne dan Mars BPK</b>
	<b>7  </b>	<b>Visi, Misi, Tujuan Strategis BPK</b>

## Bagian 2

<b>Halaman</b>	<b>9  </b>	<b>Pengantar Kepala Perwakilan</b>
	<b>10  </b>	<b>Sekilas Perwakilan</b>
		<b>Sejarah Perwakilan</b>
		<b>Visi, Misi, Tujuan Strategis BPK Perwakilan</b>
		<b>Periode Kepemimpinan Kepala Perwakilan</b>

## Bagian 3

<b>Halaman</b>	<b>14  </b>	<b>Struktur Organisasi</b>
	<b>15  </b>	<b>Profil Pejabat Struktural</b>
	<b>19  </b>	<b>Grafis Sumber Daya Manusia</b>
	<b>23  </b>	<b>Kinerja Perwakilan</b>
	<b>35  </b>	<b>Gambaran Entitas</b>

## Bagian 4

<b>Halaman</b>	<b>67  </b>	<b>Kaleidoskop 2015</b>
----------------	-------------	-------------------------

## PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN

**Alhamdulillahirobbil'alamin.** Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat, limpahan nikmat, dan barokahNya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkarya bagi bangsa dan negara tercinta.

Dalam rangka mengemban amanah UUD 1945 dan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 telah merealisasikan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2011—2015. Program dan kegiatan tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan pendukung dan penunjang pemeriksaan.

Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merupakan media informasi kinerja Perwakilan selama tahun 2015. Capaian tersebut tentunya tidak dapat diraih tanpa melalui kerja sama yang baik antara seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Laporan Tahunan 2015 ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih dekat tentang Perwakilan, tetapi juga dapat menjadi motivator bagi pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun mendatang sesuai dengan visi misi BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Dengan segala kelebihan dan keterbatasan, kami sampaikan Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2016

**Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

**Arman Syifa**



## SEKILAS PERWAKILAN



Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23G Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, dibentuklah Perwakilan BPK di Bandung (sekarang **BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**) pada tanggal 27 Januari 2006.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung, adalah salah satu unsur Pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPK di daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang berada di bawah Auditor Utama Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V.

Peresmian dan pembukaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Ketua BPK saat itu, Anwar Nasution, di Gedung eks KASIPA II Jalan Surapati No. 12 Bandung. Saat itu, gedung tersebut berstatus pinjam pakai.

Saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menempati gedung kantor sendiri yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung. Gedung tersebut diresmikan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo pada tanggal 12 Mei 2011.



## **VISI**

Menjadi BPK Perwakilan yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai – nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di wilayah Provinsi Jawa Barat

## **MISI**

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas di wilayah Perwakilan Provinsi Jawa Barat;  
Mengusulkan rumusan bahan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan  
Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

## **TUJUAN STRATEGIS**

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mencapai Tujuan Strategis (TS) sebagai berikut :

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan  
Mewujudkan tata kelola dan tata laksana untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pemeriksaan di BPK Perwakilan.

## PERIODE KEPEMIMPINAN

Periode  
2006 - Oktober 2007



Ir. Saiful Anwar Nasution

Periode  
Oktober 2007 - Juli 2010



Gunawan Sidauruk, SH., M.M., M.H

Periode  
Juli 2010 - Agustus 2013



Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak

Periode  
September 2013 - September 2015



Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, M.M

Periode  
September 2015 - Sekarang



Arman Syifa SST, Macc., Ak



# STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



# PROFIL PEJABAT STRUKTURAL BPK PROVINSI JAWA BARAT



## KEPALA PERWAKILAN

### **Ir. R. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M. (Periode September 2013 - September 2015)**



Pria kelahiran Bandung, 4 Mei 1959 ini menyandang gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari ITN Bandung dan Magister Manajemen dari Universitas Satyagama. Beliau mengawali karier di BPK pada tahun 1990 sebagai pegawai pada Oditorat F. Tahun 2001, Beliau diangkat menjadi Kepala Seksi II.C.4.1 AKN II. Pada Januari 2006, Beliau dipromosikan sebagai Kasubaud II.C.4 AKN II dan kemudian dimutasikan sebagai Kasubaud Irian Jaya Barat II pada November 2006. Setelah menjabat sebagai Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat (Feb 2007-Agt 2009), Beliau dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat (Agt 2009 – Sept 2010), kemudian Kepala Auditorat VI.B AKN VI (Sept 2010 - Jan 2011), dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan (Jan 2011-Sept 2013). Pada September 2013 s.d. September 2015, Beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Beliau kembali dipindah dan menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2015.

### **Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak. (Periode September 2015 - Sekarang)**

Pria kelahiran Garut, 4 April 1969 ini merupakan lulusan STAN dan menyandang gelar Magister Akuntansi dari Universitas Case Western. Beliau mengawali karier di BPK pada tahun 1990 pada unit Oditorat F. Pada tahun 2002, Beliau menjadi Kepala Seksi Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi AKN I dan dimutasi sebagai Kepala Seksi Depnakertrans-2 AKN I pada tahun 2006. Selama tahun 2007, Beliau sempat menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, Kepala Seksi III.A.2.1 AKN III, dan Kasubaud Subauditorat I.A.1 AKN I. Pada September 2013, Beliau dipromosikan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali. Pada September 2015, Beliau dipindah dan menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, menggantikan Ir. R. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M.





### **Emmy Mutiarini, SE, M.Si. Ak.**

Lahir di Palembang pada 28 September 1971, Beliau menjadi satu-satunya Kepala Subauditorat wanita di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Lulusan sarjana akuntansi dari Universitas Sriwijaya dan magister akuntansi dari Universitas Gadjah Mada ini sempat menjabat beberapa posisi sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jabar I di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Juli 2012.

Mengawali karier di BPK sejak tahun 1997, beberapa jabatan yang pernah dijalaninya sebelum menjabat di Jawa Barat adalah Kepala Seksi BPK pada 2007, Kepala Seksi Lampung I.A BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada 2008.

### **Hesti Sunaryono, S.E., M.M., Ak.**

Pria kelahiran Surakarta, 15 November 1961 ini mengawali karier di BPK pada tahun 1992. Lulusan pasca sarjana manajemen Universitas Satyagama ini sempat menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat I BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007, sebelum akhirnya dimutasi ke BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai Kepala Subauditorat Riau II pada tahun 2010. Beliau kembali ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Desember 2014 dan menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jabar II. Beliau menggantikan Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak. yang dimutasi menjadi Kepala Subauditorat V.A.2 AKN III. Beberapa jabatan lain yang pernah dijabat diantaranya adalah Kepala Seksi LETTINA AKN III (2004), Kepala Seksi Kemeneg, LPND 1.2 AKN III (2006), dan Kepala Seksi III.A.2.2 AKN III (2007).



### **T. Ipoeng Andjar Wasita, S.E., M.M.**

Lahir di Bantul pada 21 Desember 1968, Beliau menyelesaikan pendidikan akademisnya sebagai sarjana muda akuntansi STAN, sarjana manajemen Universitas Indonesia, dan pasca sarjana manajemen Universitas Gadjah Mada.

Mengawali karier di BPK sejak tahun 1989, Beliau pernah menjabat beberapa posisi sebelum akhirnya menjadi Kepala Subauditorat Jabar III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012. Beberapa jabatan yang pernah didudukinya adalah Kepala Subbagian Evaluasi Sekretariat Jenderal (2002), Kepala Subbagian Diklat Non Fungsional Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (2007), Kepala Subauditorat VII.A.1 AKN VII (2008).



## **Kepala Sekretariat Perwakilan**



### **Setyo Prayitno, S.E., M.M.**

Lahir di Magetan pada 25 Maret 1964, Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana manajemen Universitas Taman Siswa dan pasca sarjana manajemen Universitas Budi Luhur. Mengawali karier di BPK pada tahun 1993, beliau sempat menduduki beberapa jabatan, diantaranya Kepala Seksi Mabes Polri BNN AKN I (2006), Kepala Seksi I.B.3.3 AKN I (2007), dan Kepala Subauditorat I.C.3 AKN I (2010).

Pada Maret 2015, Beliau dimutasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan. Beliau menggantikan Drs. Walmin Purba, M.M. yang menjadi Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta.



**Novie Irawati H.P., S.E., M.Ak.**

Lahir di Bandung pada 13 November 1975, Beliau menyelesaikan pendidikan diploma III akuntansi STAN, sarjana akuntansi USNI, dan pasca sarjana manajemen keuangan sektor publik Universitas Indonesia.

Mengawali karier di BPK sejak tahun 2000, Beliau mulai menjabat sebagai Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat pada November 2007. Pada Januari 2015 sesuai dengan SOTK BPK yang baru, Beliau menjabat menjadi Kepala Subbagian Humas dan TU Perwakilan.

**Ruly Ferdian, S.H.**

Lahir di Jakarta pada 22 Februari 1978, Beliau menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Mengawali karier di BPK sejak tahun 2002, Beliau sempat menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Pada Maret 2013, Beliau memulai jabatannya sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada Januari 2015 sesuai dengan SOTK BPK yang baru, Beliau menjabat menjadi Kepala Subbagian Hukum.



**Santi Elsanti, S.E., M.M., Ak.**

Lahir di Bandung pada 20 Desember 1969, Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di STIE YPKP Bandung dan pasca sarjana manajemen Universitas Gadjah Mada.

Mengawali karier di BPK pada tahun 1996, Beliau sempat menjabat posisi Kepala Subbagian Pengembangan Sekretariat Jenderal BPK, Subbagian Remunerasi Sekretariat Jenderal BPK, hingga akhirnya pada Maret 2010 dimutasi menjadi Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

**Deni Wirahmana, S.Sos.**

Lahir di Bandung pada 13 Oktober 1965, Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana administrasi negara dan pemerintahan pada STIA LAN.

Mengawali karier di BPK sejak tahun 1989, Beliau sempat menjabat sebagai Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Beliau kemudian dimutasi menjadi Kepala Subbagian Umum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhitung mulai 30 November 2012. Pada Januari 2015 sesuai dengan SOTK BPK yang baru, Beliau menjabat menjadi Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.



**Kodir, S.E.**

Lahir di Bogor pada 13 September 1967, Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi non register Universitas Pakuan Bogor.

Memulai karier di BPK tahun 1998, Beliau dipromosikan sebagai Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Papua pada tahun 2010. Beliau kemudian dimutasi menjadi Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhitung mulai 5 Juli 2013.

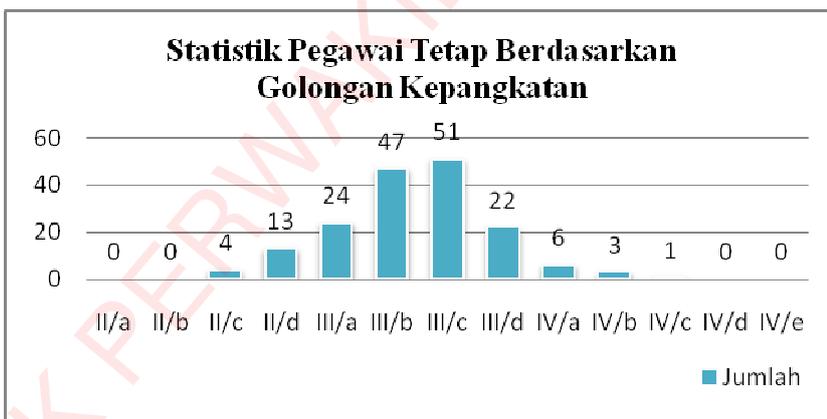
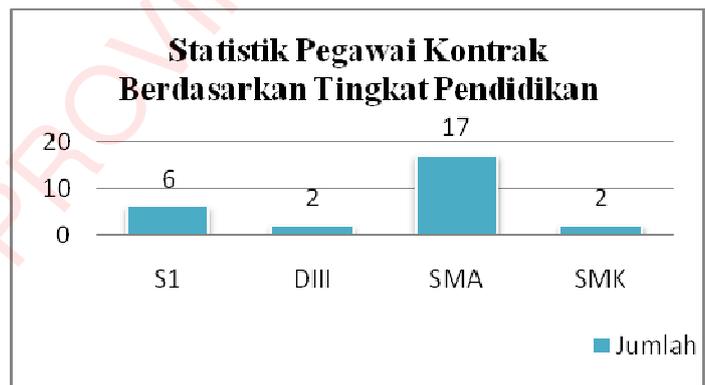
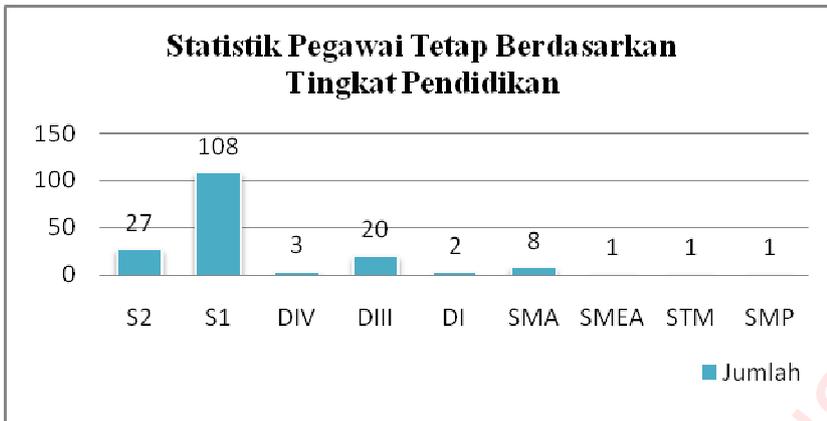
# GRAFIS

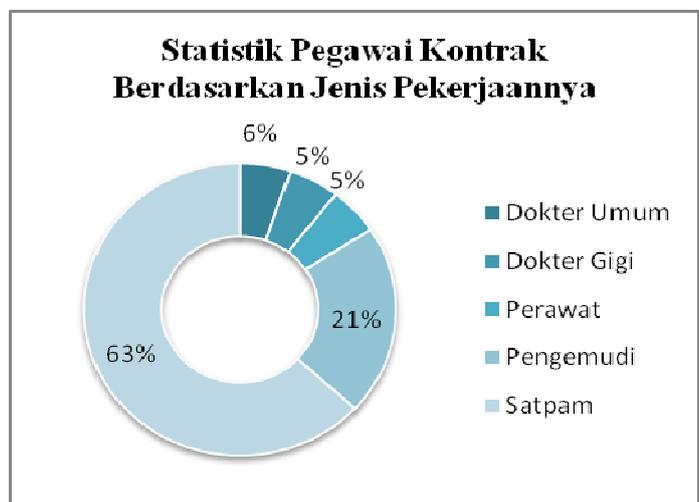
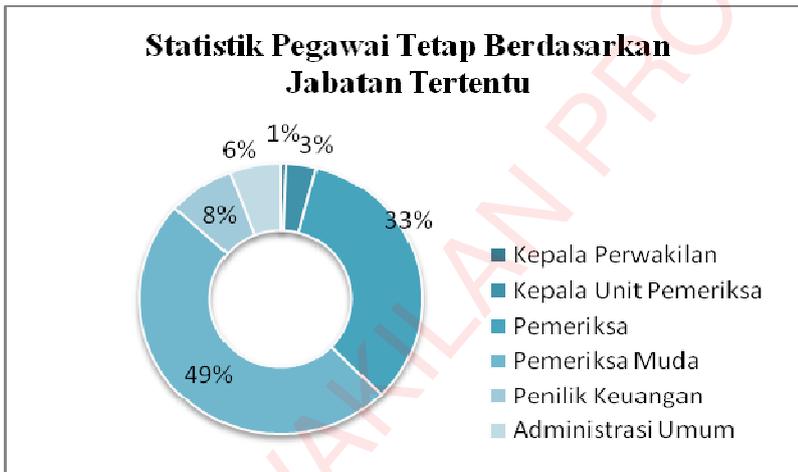
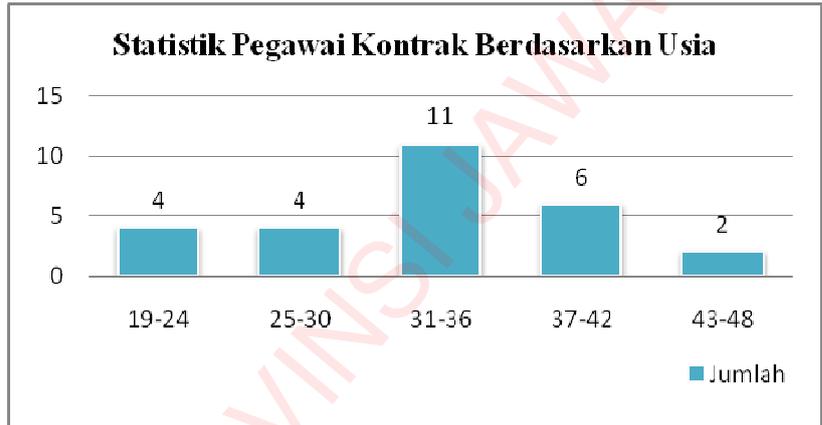
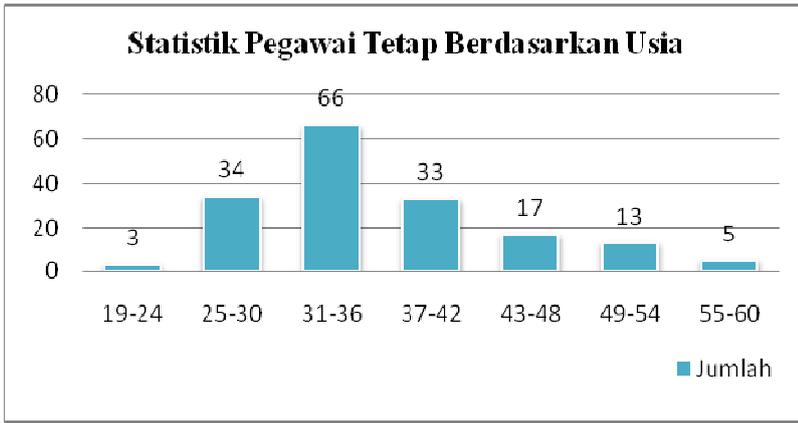
## SUMBER DAYA MANUSIA

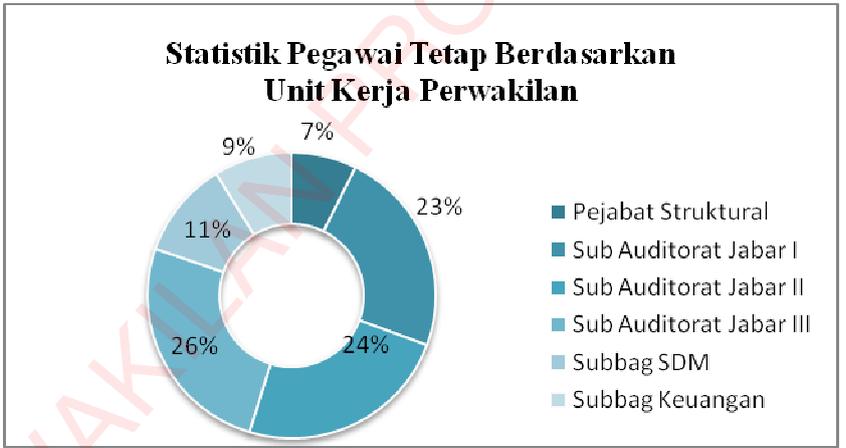
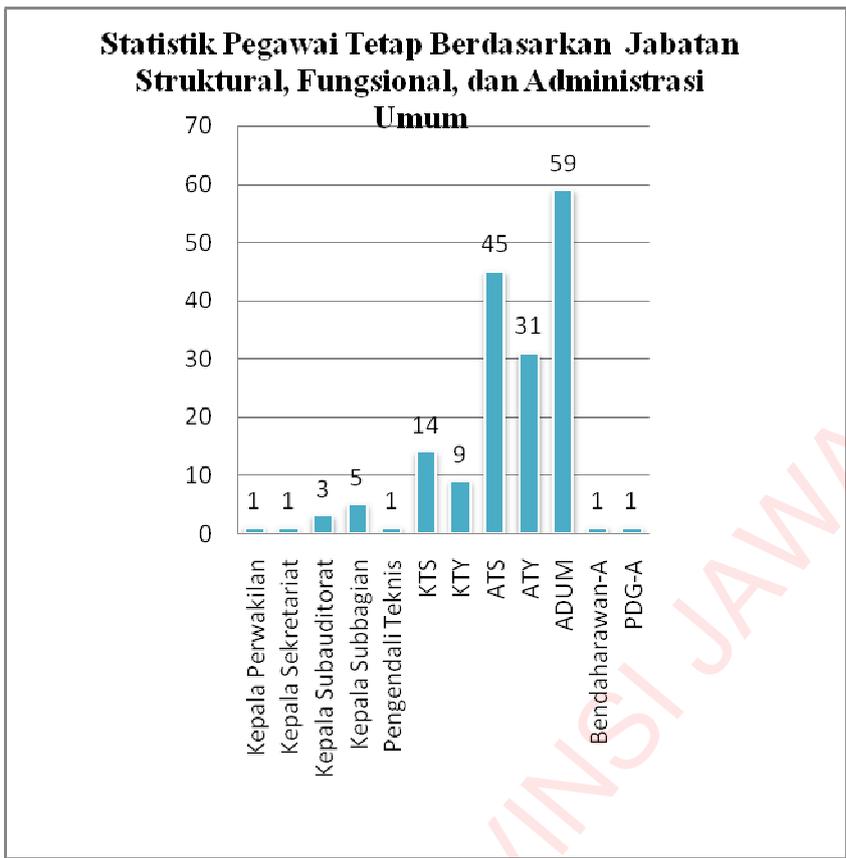
### BPK PROVINSI JAWA BARAT



Berdasarkan data Bezzeting Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2015, jumlah pegawai tetap adalah sebanyak 171 orang dengan komposisi laki-laki 108 orang dan perempuan 63 orang. Sedangkan jumlah pegawai tidak tetap adalah sebanyak 25 orang dan 2 orang CPNS.







**Perspektif Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi BPK dalam Renstra BPK 2011—2015 : Area Pengembangan SDM menekankan pada Pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi.**

# KINERJA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2015



Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

### Subauditorat Jawa Barat I

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

### Subauditorat Jawa Barat II

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

### Subauditorat Jawa Barat III

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas

### Sekretariat Perwakilan

Bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbag Hukum.



## ANGGARAN dan REALISASI PERWAKILAN

Berikut adalah tabel perbandingan anggaran dan realisasi belanja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2015, Perwakilan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp37.804.912,000,00 dan sampai dengan bulan Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp33.926.010.218,00. Secara rinci, perbandingan anggaran dan realisasi tersebut tersaji sebagai berikut.

Kode Anggaran	004.001.450799/ DIPA Setjen	
Tahun Anggaran	2014	2015
Anggaran	15,610,901,000	16,645,161,000
Realisasi	14,786,921,697	16,339,247,923
%	94.72%	98.16%
Kode Anggaran	004.001.450801/ DIPA PUSAT	
Tahun Anggaran	2014	2015
Anggaran	20,670,897,000	21,159,751,000
Realisasi	17,464,696,537	18.868.667.046
%	84.49%	89.17%

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir.

IKU	Uraian	Capaian		
		2015	2014	2013
9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	93,13%	92,94%	90,66%

# RENCANA dan REALISASI PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Keterangan
1	LK	28	28	*Pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2014 *Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2014
2	Kinerja	16	16	*2 Pendahuluan dan Terinci Program Kemiskinan Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat *6: Pendahuluan dan Terinci SAP Aktual: Kab. Bogor dan Kota Depok, Kab. Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya. *4 Pendahuluan dan Terinci Manajemen Aset : Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Cirebon. *3 Pendahuluan Air Bersih Non Perpipaan Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur dan Kab. Sumedang. *1 Kinerja dan Efisiensi Bjb
3	PDTT	43	42	*27 Banparpol *1 Pendapatan dan Biaya PT Jasa Sarana Provinsi Jawa Barat *4 Pendapatan: Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Cirebon , Kab. Subang. *9 Belanja: Kota Bandung, Kab.Bogor, Kab.Cirebon, Kab.Garut, Kota Bogor, Kab.Pangandaran, Kota Depok, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. *1 Manajemen Aset Kota Cirebon
	Jumlah	87	86	

## SARANA dan PRASARANA BPK PROVINSI JAWA BARAT

Berikut adalah nilai Barang Milik Negara periode Tahun Anggaran 2015 yang tersaji dalam Neraca Laporan BMN.

No	Akun Neraca SIMAK BMN	Saldo Akhir (31 Des 2015)
<b>I</b>	<b>POSISI BMN DI NERACA</b>	<b>96,348,654,991.-</b>
<b>A</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>210,870,507.-</b>
1	Persediaan	210,870,507.-
<b>B</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>95,427,450,044.-</b>
1	Tanah	42,077,279,768.-
2	Peralatan dan Mesin	33,155,851,553.-
3	Gedung dan Bangunan	50,423,089,951.-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,197,161,132.-
5	Aset Tetap Lainnya	171,971,507.-
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	0.-
7	<i>Akum. Penyusutan Aset Tetap</i>	-44,597,903,867.-
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>710,334,440.-</b>
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.-
2	Aset Tidak Berwujud	680,634,440.-
3	Aset Lain-lain	430,994,559.-
4	<i>Akum. Penyusutan Aset Lainnya</i>	-401,294,559.-
<b>II</b>	<b>BMN NON NERACA</b>	<b>16,447,787.-</b>
<b>A</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>16,447,787.-</b>
1	BMN Ekstrakomptabel	66,562,250.-
2	<i>Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel</i>	-50,114,463.-
<b>B</b>	<b>BPYBDS</b>	<b>0.-</b>
<b>C</b>	<b>BARANG HILANG</b>	<b>0.-</b>
<b>D</b>	<b>BARANG RUSAK BERAT</b>	<b>0.-</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>96,365,102,778.-</b>

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas tanah yang dimiliki BPK Provinsi Jawa Barat.

Tanah yang dimiliki BPK Provinsi Jawa Barat masih meliputi :

1. Tanah untuk Kantor seluruhnya seluas 7.140 m<sup>2</sup> di Jl. Moh Toha 164 Bandung.
2. Tanah untuk Rumah Dinas Eselon II seluas 950 m<sup>2</sup> di Jl. Cipaganti Permai. Bandung
3. Tanah untuk Rumah Dinas Eselon III seluas 585 m<sup>2</sup> di Jl. Cigadung Selatan Bandung.
4. Tanah untuk Rumah Dinas Eselon III, Eselon IV, dan Mess seluas 2.000 m<sup>2</sup> di Jl. Lapangan Tembak Bandung.
5. Tanah untuk Bangunan Mess seluas 1236 m<sup>2</sup> di Jl. Cipamokolan Bandung.

Perkembangan nilai BMN selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1.	TA 2015	141.414.415.667,00	1.853.317.356,00	1,33
2.	TA 2014	139.561.098.311,00	4.315.027.708,00	3,19
3.	TA 2013	135.246.070.603,00	2.118.514.608,00	1,59
4.	TA 2012	133.127.555.995,00	5.745.790.301,00	4,51
5.	TA 2011	127.381.765.694,00	0,00	0,00



Kegiatan yang dilakukan Subbagian Hukum terkait permintaan pendapat hukum, konsultasi, dan kajian hukum selama tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut. Permintaan tersebut mencakup permintaan pendapat hukum dari internal Perwakilan maupun pihak luar seperti LSM, pemerintah daerah setempat, dan instansi vertikal lainnya.

No.	Uraian Permintaan Pendapat Hukum/Konsultasi/Kajian Hukum	Proses
1	Temuan dan tindak lanjut LHP LKPD TA 2013 "terdapat harga satuan dalam HPS dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Tidak Sesuai Standar Harga Bupati sebesar Rp1.222.055.772,71 dan Rp838.384.324,84"	100%
2	Konsep LHP atas Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2014 mengenai temuan pemeriksaan "Pengelolaan Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan daerah sebesar Rp1.552.432.632,00"	100%
3	Temuan pemeriksaan atas LHP Belanja Daerah Pemkab Sumedang TA 2014 "Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Belum Sesuai Ketentuan"	100%
4	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor:503/110/Pend II perihal permohonan penjelasan BPHTB	100%
5	Surat Kaporesta Bekasi Nomor B/15/II/2015/Resta Bekasi perihal Permohonan Saksi Ahli	100%
6	Permohonan telaah hukum terkait Keputusan Walikota Bandung Nomor. 027/Kep.887-DPKAD/2014 tanggal 29 Agustus 2014	100%
7	Surat Bupati Purwakarta Nomor 180/873/Huk tanggal 14 April 2015 perihal Permohonan Pendapat Hukum /Fatwa Terhadap Pembayaran Ganti Rugi oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Perkara Melawan Sdr. Acep Maman	100%
8	Konsep LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2014 mengenai temuan pemeriksaan "Kelebihan Pembayaran atas Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon sebesar Rp472.230.910,48"	100%
9	Temuan Pemeriksaan pada Pemeriksaan LKPD Kota Bandung TA 2014 "Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Tidak Mepedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 dan Perwal Nomor 360 Tahun 2014".	100%
10	Surat Walikota Bogor Nomor 640/1666-BPKAD tanggal 13 Mei 2015 perihal Permohonan Kajian Bangun Guna Serah Pangrango Plaza Bogor.	100%
11	Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor 900/3.336-Bid I tanggal 27 Mei 2015 perihal Permohonan Arahan atas Pembiayaan Penilaian AMDAL.	100%
12	Surat Sekretaris Kota Depok perihal Permohonan Pendapat terkait dengan Fasum/Fasos ex PT Wisma Mas Citra Raya.	100%

No.	Uraian Permintaan Pendapat Hukum/Konsultasi/Kajian Hukum	Proses
13	Konsep LHP atas LKPD Kabupaten Subang TA 2014	100%
14	Surat Kepala Dispenda Kabupaten Sumedang Nomor 973/1329-Dipenda/2015 Tanggal 08 Juli 2015 perihal Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	100%
15	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor R-129/O.2.33/Fd.1/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara.	100%
16	Surat LSM Indonesia Menggugat Against Corruption Nomor 033/IM/SR/W/BKS/K/IX/2015 tanggal 10 September 2015 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Kolusi pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor:650/Kep-306-Distako/VI/2015 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Meter Parkir Dalam Rangka Mewujudkan Kota Bekasi Yang Cerdas	100%
17	Surat dari Smart Cipta Solution Nomor 02/BK-BPK/IX/XV perihal Permohonan Konsultasi Program	100%
18	Surat LSM Solidaritas Transparansi Intelektual Pemerhati Indonesia Nomor 019/SP-SNIPER.IND/BPK/IX/2015 tanggal 21 September 2015	100%
19	Permintaan Telaah Hukum terkait dengan Pemeriksaan Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai kewenangan penghapusan Barang Milik Daerah	100%
20	Surat dari Media Rajawali News Nomor 72/MD/RJW-News/29/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pengadaan Berkas LHP	100%
21	Surat LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Nomor 215/PH/DPP/LSM PMPR INDONESIA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Permohonan LHP BPK RI	100%

**Untuk mengukur pencapaian Renstra 2011-2015, salah satu indikator kinerja utama dalam perspektif indikator dampak adalah persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum.**

Adapun permintaan pendapat hukum yang telah dilakukan ke Ditama Binbangkum adalah sebagai berikut.

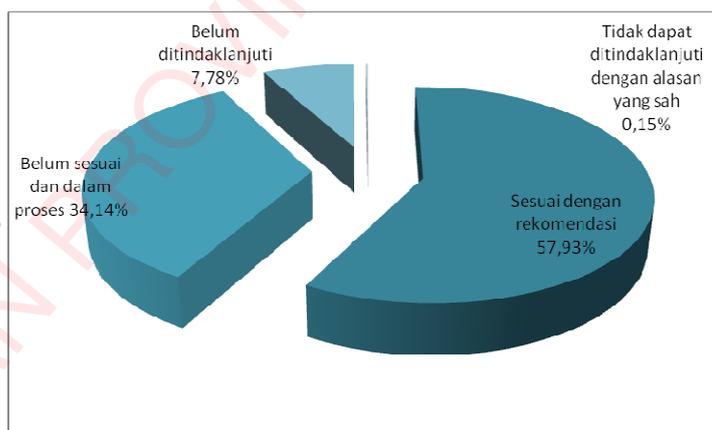
No	LHP atas	Dari Perwakilan ke Ditama Binbangkum/AKN V	Dari Ditama Binbangkum ke Perwakilan	Perihal
1	LKPD Kabupaten Indramayu TA 2013	No. 150/ND/XVIII.BDG/06/2014 tanggal 13 Juni 2014	No. 583/ND/XVIII/09/2014 tanggal 29 September 2014	Penyampaian pendapat hukum dan resume pendapat hukum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
2	LKPD Kabupaten Subang TA 2014	No. 192/ND/XVIII.BDG/07/2015 tanggal 13 Juli 2015	belum ada	Pelaporan kepada Instansi Berwenang atas Temuan Indikasi Kerugian Daerah dalam LHP LKPD 2014 Kabupaten Subang

Kegiatan pemberian keterangan ahli di Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

No	No & Tanggal Surat Pemanggilan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	Perkara	Tempat Pelaksanaan	Tanggal
1	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi No. B-400/O.2.38/Ft.1/03/2015 tanggal 4 Maret 2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pembahasan Raperda dan Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi TA 2011	Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat	11 Maret 2015
2	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi No. B-341/O.2.38/Ft.1/04/2015 tanggal 6 April 2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pembahasan Raperda dan Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi TA 2011	Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat	8 April 2015
3	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta No. B-801/O.2.15.4/Ft.1/03/2015 tanggal 11 Maret 2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Cikao pada Kabupaten Purwakarta TA 2009	Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat	16 Maret 2015
4	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta No. B-15/O.2.15/Ft.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Cikao pada Kabupaten Purwakarta TA 2009	Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat	23 Maret 2015
5	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi No. B-1688/O.2.38/Ft.1/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pembahasan Raperda dan Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi TA 2011	Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat	12 Oktober 2015

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

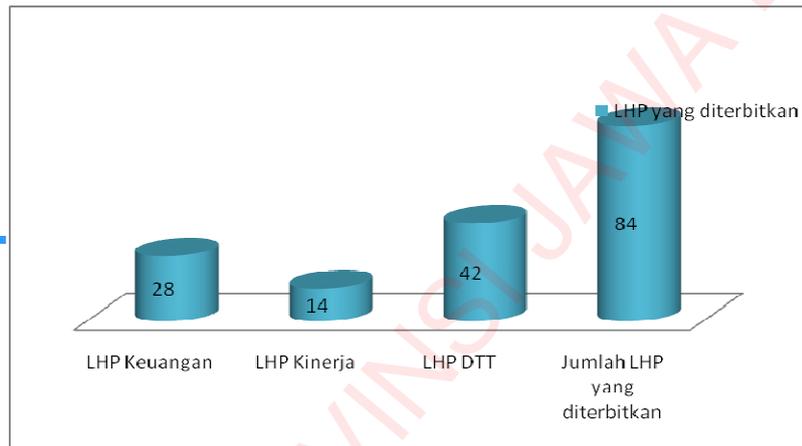
No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	5.770	57.93%
2	Belum sesuai dan dalam proses	3.400	34.14%
3	Belum ditindaklanjuti	775	7.78%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	15	0.15%
Jumlah Rekomendasi yang disampaikan		9.960	100,00



### Perbandingan dari Tahun ke Tahun

IKU	Uraian	Capaian		
		2015	2014	2013
1.1	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	58.08%	45,13%	48,23%

No.	LHP yang diterbitkan	Jumlah
1	LHP Keuangan	28
2	LHP Kinerja	14
3	LHP DTT	42
<b>Jumlah LHP yang diterbitkan</b>		<b>84</b>

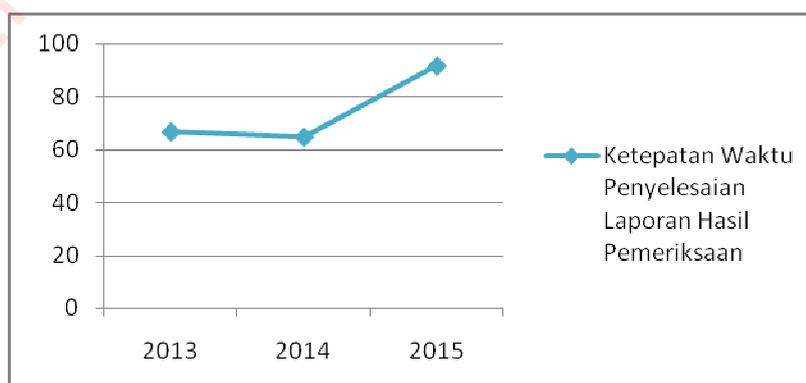


#### Perbandingan dari Tahun ke Tahun

IKU	Uraian	Capaian		
		2015	2014	2013
2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	84	85	66

#### Perbandingan dari Tahun ke Tahun

IKU	Uraian	Capaian		
		2015	2014	2013
2.4	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	91,67%	64,71%	66,67%



Jumlah pengaduan masyarakat : 38 surat/dokumen.

Jumlah pengaduan instansi lainnya : 17 surat/dokumen.

Jumlah permohonan informasi publik : 45 permohonan.

Jumlah kegiatan *media relations* : 3 kegiatan.



1 Juli – Media Visit

30 Nov – Talkshow Radio



30 Nov – Goes To School





# Provinsi Jawa Barat



# GAMBARAN ENTITAS BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2015

## - PROVINSI JAWA BARAT -

### SEJARAH



Pada abad ke-5, Jawa Barat merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Setelah tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibukota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurs hervormingwet* tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau *Pasoendan*, yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1949, Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Pada tahun 1950, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar, dengan Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari.

### GEOGRAFIS

Provinsi Jawa Barat, secara geografis terletak pada posisi 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudra Indonesia;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Provinsi Banten.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 - 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat. Iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,4 - 30,7°C dan kelembaban udara antara 73-84%. Data BMKG menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008, hujan turun selama 1-26 hari setiap bulannya, dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.

## POTENSI WILAYAH

- **Pertanian**

Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran. Di samping itu, juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi, 34% dari hasil total nasional.

- **Kelautan dan Perikanan**

Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan samudera Hindia di bagian selatan dengan panjang pantai sekitar 1000 km. Berdasarkan letak inilah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Suatu perencanaan terpadu tengah dilaksanakan untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan Pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan. Untuk potensi perairan darat, tidak hanya dari jumlah sungai yang mengalir di Jawa Barat tetapi potensi ini juga diperoleh dari penampungan air/DAM Saguling di Cirata dan DAM Jatiluhur yang selain menghasilkan tenaga listrik juga berguna untuk mengairi area pertanian dan industri perikanan air tawar.

- **Sumber Daya Manusia: Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja**

Jawa Barat memiliki tenaga pekerja berpendidikan sejumlah 15,7 juta orang pada tahun 2001 atau 18 persen dari total nasional tenaga pekerja berpendidikan. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%), dan sektor pelayanan (29%).

- **Minyak-Mineral dan Geothermal**

Minyak ditemukan di sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat, sementara cadangan geothermal (panas bumi) terdapat di beberapa daerah di Jawa Barat. Tambang lain seperti batu gamping, andesit, marmer, tanah liat merupakan pertambangan mineral, termasuk mineral lain yang cadangan depositnya sangat potensial, yaitu emas yang dikelola PT. Aneka Tambang. Potensinya sebesar 5,5 million ton dan menghasilkan 12,1 gram emas per ton.

- **Pariwisata**

Objek-objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi di daerah Jawa Barat ada sebanyak 61 objek wisata. Kesenian yang ada di Jawa Barat sebanyak 18 kesenian.

## GAMBARAN KONDISI KEUANGAN

Neraca TA 2014 (Audited)		LRA (Audited)	
Aset	Rp28.614.139.178.798,10	Pendapatan	Rp22.310.953.031.230,00
Kewajiban	Rp495.858.371.515,29	Belanja	Rp20.797.988.465.006,00
Ekuitas	Rp28.118.280.807.282,80	Pembiayaan Netto	Rp3.036.108.941.804,00

## - KABUPATEN BANDUNG -

### SEJARAH



Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu 20 April 1641 M. Sebagai Bupati Pertama adalah Tumenggung Wiraan-gunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung.

Pada saat pemerintahan Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874), ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut *Negorij Bandoeng*. Tahun 1850 mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung, kemudian memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan sekolah untuk para menak (*Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren*). Atas jasa-jasanya, Bupati Wiranatakusumah IV mendapat penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang. Ibukota Kabupaten Bandung adalah Soreang. Saat ini Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati H. Dadang M. Naser dan Wakil Bupati H. Deden Rukman Rumaji. Ketua DPRD adalah Anang Susanto.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Bandung berada pada 6°,41' – 7°,19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' – 108°5' Bujur Timur, dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas-batas wilayahnya yaitu:

**Sebelah utara** dengan Kabupaten Bandung Barat;

**Sebelah timur** dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;

**Sebelah selatan** dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur ;

**Sebelah barat** dengan Kabupaten Bandung Barat;

**Bagian tengah** dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkuban perahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan, terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Guntur (2.249 m). Keduanya terletak di perbatasan Kabupaten Garut.

### POTENSI WILAYAH

Potensi Daerah Kabupaten Bandung mencakup Seni Tradisional (angklung, badawang, benjang dan calung), Wisata Alam (SKW Situ Patengan meliputi Situ Patengan, Perkebunan Rancabali, Ranca Upas, Air Panas Cimanggu, Kawah Putih, Arung Jeram Ciwidey, Kawah Cibuni, Perkebunan Gambung, Wisata Gunung Padang, Punceling; SKW Pangalengan meliputi Situ Cileunca, Perkebunan Teh Malabar, Kawah Papandayan, Tirta Kertamanah, Tirta Camelia, Air Panas Cibolang, Air Panas Citere, Bumi Perkemahan Gunung Puntang, Curug Siliwangi, Danau Ciharus, Mandala Wisata; SKW Ujungberung meliputi Curug Cinulang, Arung Jeram Citarik, Bumi Perkemahan Batu Kuda, Bumi Perkemahan Oray Tapa), Benda Cagar Budaya Bergerak (sebanyak 91 di 16 Kecamatan), Pertanian dan Pekebunan (meliputi tanaman bahan pangan, sayur-sayuran, perkebunan dan buah– buahan).

## - KOTA BANDUNG -

### SEJARAH

Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung. Bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah *the founding father* kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung pada 25 September 1810. Saat ini, Kota Bandung dipimpin oleh Walikota Ridwan Kamil dan Wakil Walikota Oded Muhammad Danial. Ketua DPRD adalah Isa Subagdjaja.



### GEOGRAFIS

Kota Bandung merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat, terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, karena terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibu kota Negara dan Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan). Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Temperatur rata-rata 23,5 C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

### POTENSI WILAYAH

Potensi kesenian diantaranya adalah Benjang, Angklung, Jaipongan, Prakpilingkung, Marakdunga, Tembang Sunda, Upacara Adat, Reak, Pantun Buhun, Tembang Kacapi Suling, Celempung, Degung, Debus, Gondang, Kliningan, Jenaka Sunda, Penca Silat, Tayub, Wayang Golek, Reog, Arumba, Cianjuran, Calung, Kuda Lumping, Sendratari, Lonser.

Potensi objek dan daya tarik wisata diantaranya adalah Kebun Binatang Bandung, Taman Ganesha Bandung dan Taman Lansia.

## - KABUPATEN BANDUNG BARAT -

### SEJARAH



Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom yang terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan seiring dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh UU No.22/1999. Pada 9 Agustus 1999, para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat, Forum Peduli Bandung Barat, Forum Bandung Barat Bersatu, serta Forum Pemuda Bandung Barat.

Karena sama-sama memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin oleh Ketua Umum Drs. H. Endang Anwar. KPPKBB yang bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Akhirnya, lahir UU No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat yang beribu kota di Ngamprah saat ini dipimpin oleh Bupati Abubakar dan Wakil Bupati Yayat Turochmat Soemitra. Ketua DPRD adalah AA. Umbara Sutisna.

### GEOGRAFIS

Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM<sup>2</sup>, terletak antara 60° 41' s.d. 70° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' s.d. 108° 05' Bujur Timur. Kabupaten Bandung Barat mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringan wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut:

**Sebelah barat** berbatasan dengan Kabupaten Cianjur;

**Sebelah utara** berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

**Sebelah timur** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi;

**Sebelah selatan** berbatasan dengan Selatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata (Kawah Gunung Tangkuban Perahu, Curug Omas Maribaya, Observatorium Bosscha).

## - KABUPATEN SUKABUMI -

### SEJARAH



Hari Jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober yang didasarkan dari titimangsa keberhasilan para pejuang muda Sukabumi, setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang akibat kalah dari Sekutu pada tahun 1945. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda berhasil lolos masuk ke Sukabumi. Pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di bawah Mr. Soewardi, untuk sementara dipindahkan ke Nyalindung, sebelah Selatan kota Sukabumi. Belanda membentuk pemerintahan sipil dan mengangkat R.A.A. Hilman Djajadiningrat sebagai Bupati Sukabumi, yang kemudian digantikan oleh R.A.A. Soeriadanoeningrat.

Tahun 1950, setelah kekuasaan kembali ke tangan Republik Indonesia, pemerintahan di daerah ditata kembali berdasarkan UU 22/1948. Sesuai UU 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi menjadi daerah otonom. R.A. Widjajasoeria diangkat menjadi Bupati, menggantikan Soeriadanoeningrat. Setelah terbitnya Penpres R.I 6/1959, tugas-tugas pusat bidang pemerintahan umum maupun urusan rumah tangga daerah diserahkan ke tangan Bupati/Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bupati/Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). R. Koedi Soeridihardja diangkat sebagai Bupati/Kepala Daerah hingga tahun 1967, yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Anwari. Saat ini Kabupaten Sukabumi yang ibukotanya Pelabuhan Ratu dipimpin oleh Bupati Dr. H. Sukmawijaya, M.M dan Wakil Bupati Drs. Akhmad Jajuli, M.Pd. serta Ketua DPRD Agus Mulyadi.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Sukabumi terletak diantara 106°49 sampai 107° Bujur Timur 60°57 - 70°25 Lintang Selatan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kab. Bogor;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudera Indonesia;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kab. Lebak;

**Sebelah Timur** dengan Kab. Cianjur.

Batas wilayah tersebut 40% berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang cukup luas yaitu ± 419.970 ha. Wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai bentuk lahan yang bervariasi dari datar sampai gunung adalah: datar (lereng 0-2%) sekitar 9,4 %, berombak sampai bergelombang (lereng 2-15%) sekitar 22%, bergelombang sampai berbukit (lereng 15 - 40%) sekitar 42,7%, dan berbukit sampai bergunung (lereng > 40 %) sekitar 25,9 %. Ketinggian dari permukaan laut Wilayah Kabupaten Sukabumi bervariasi antara 0 - 2.958 m. Daerah datar umumnya terdapat pada daerah pantai dan daerah kaki gunung yang sebagian besar merupakan daerah pesawahan.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata (Pelabuhan Ratu, Pantai Cisolok, Ujung Genteng, Rafting di sungai Citarik).

## - KOTA CIMAH I -

### SEJARAH

Cimahi mulai dikenal tahun 1811. Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran *staat blad* tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kedewanan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif (PP No. 29 Tahun 1975). Pada 29 Januari 1976, diresmikan menjadi Kotif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan PP Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif, yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Saat ini, Kota Cimahi dipimpin oleh Walikota Atty Suharti Tochija dan Wakil Walikota H. Sudiarto. Ketua DPRD adalah Achmad Gunawan.



### GEOGRAFIS

Kota Cimahi terletak di antara 107° 30'30" BT – 107°34'30" dan 65°0'00" – 65°6'00" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Cimahi 40,36 Km<sup>2</sup>. Batas-batas administratif adalah sebagai berikut:

**Sebelah utara** berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;

**Sebelah timur** berbatasan dengan Kota Bandung;

**Sebelah selatan** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung;

**Sebelah barat** berbatsan dengan Kabupaten Bandung Barat.

Secara geografis, wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan dengan ketinggian di bagian utara ± 1.040 meter dpl yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl yang mengarah ke Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan lima anak sungai yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum dan Kali Cisangkan. Sementara itu, mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dan Cisintok.

### POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah Kota Cimahi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, penggalian dan industri tanpa migas. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu potensi wilayah di Kota Cimahi yang terdiri dari potensi kesenian (Wayang Ibuk, Wayang Cepak, Benjang Jaipongan, Kecapi Suling, Calung dan Degung), potensi wisata (Desa Cireundeu).

## - KOTA SUKABUMI -

### SEJARAH

Kata Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu *Suka-bumen*, karena udaranya yang sejuk dan nyaman. Mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi, karena suka atau senang bumen-bumen atau bertempat tinggal di daerah ini. Pada tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kota Sukabumi sebagai "*Burgerlijk Bestuur*" dengan status "*Gemeenteraad Van Sukabumi*" dengan alasan bahwa di Kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa yang merupakan pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian Selatan dan harus mendapatkan pelayanan istimewa.

Sejak ditetapkannya Sukabumi menjadi Daerah Otonom pada Mei 1926, maka resmi diangkat "*Burgemeester*" yaitu Mr. GF.Rambonnet. Pada masa inilah, dibangun sarana dan prasarana penting seperti Stasiun Kereta Api, Masjid Agung, Gereja dan Pembangkit Listrik. Saat ini, Kota Sukabumi dipimpin oleh Walikota Mohamad Muraz dan Wakil Walikota Achmad Fahmi. Ketua DPRD adalah Muslikh Abdussyukur.



### GEOGRAFIS

Kota Sukabumi terletak di bagian selatan tengah Jawa barat pada koordinat  $106^{\circ} 45' 50''$  Bujur Timur dan  $106^{\circ}45' 10''$  Bujur Timur,  $6^{\circ}49' 29''$  Lintang Selatan dan  $6^{\circ}50' 44''$  Lintang Selatan. Juga terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan suhu maksimum  $29^{\circ}\text{C}$  dan berjarak 120 Km dari Ibu kota Negara dan 96 Km dari Ibu kota Provinsi dengan luas wilayah 4.800,231 Ha.

Memiliki penduduk sampai akhir tahun 2002 tercatat sebanyak 269.142 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kota Sukabumi seluruhnya berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi yakni:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

### POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah di Kota Sukabumi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, penggalian dan industri tanpa migas. Selain itu pariwisata juga menjadi salah satu potensi wilayah di Kota Sukabumi yang terdiri atas:

Potensi kesenian yang mencakup Reog, Uyeg, Penca Silat, Degung, Cador, Kliningan, Kecapi Suling dan Calung;

Potensi Wisata yaitu Selabintana, dan Air Panas Cikundul.

## - KABUPATEN CIAMIS -

### SEJARAH



Hari jadi Kabupaten Ciamis diawali dengan keluarnya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 36/X/KPTS/DPRD/1970 tanggal 06 Oktober 1970 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Sejarah Galuh yang. Perubahan nama Galuh menjadi Kabupaten Ciamis pada tahun 1916 oleh Bupati RD. Tumenggung Sastrawinata (Bupati Ke-18) sampai saat ini belum terungkap alasannya dan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Atas pertimbangan itulah, DPRD Kabupaten Ciamis dalam Sidang Paripurna khusus tanggal 17 Mei 1972 sepakat untuk menetapkan tanggal 12 Juni 1642 sebagai hari jadi Kabupaten Ciamis. Saat ini, Kabupaten Ciamis yang beribukota di Ciamis dipimpin oleh Bupati Ling Syam Arifin dan Wakil Bupati Jeje Wiradinata. Ketua DPRD adalah Asep Roni.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Ciamis mempunyai luas wilayah sekitar 244.479 Ha. Secara geografis, letaknya berada pada koordinat 1080 20 sampai dengan 1080 40 Bujur Timur dan 70 40 20 sampai dengan 70 41 20 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar - bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - > 40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - > 40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, Kabupaten Ciamis pada umumnya mempunyai tipe iklim C, dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.987 mm/tahun dan suhu rata-rata antara 200 - 300 C.

### POTENSI WILAYAH

Objek wisata yang ditawarkan di Kabupaten Ciamis adalah Ngarai Hijau (Green Canyon), Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Lembah Putri, Pantai Karapyak, Karang Nini, Pantai Batu Hiu, Pantai Pangandaran, Citumang, Situ Lengkong, Karang Kamuliyen (Ciung Wanara).

Beragam makanan khas ditawarkan seperti Sale Pisang, Galendo, Gula Merah, dan Abon Ikan Patin.

## - KABUPATEN CIREBON -

### SEJARAH

Mengawali cerita sejarah ini sebagai Purwadaksina, Purwa Kawitan Dak-sina Kawekasan. Tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat pulau Jawa, Pakuan Pajajaran, yang *Gemah Ripah Repeh Rapih Loh Jinawi Subur Kang Sarwa Tinandur Murah Kang Sarwa Tinuku, Kaloka Murah Sandang Pangan Lan Aman Tentrem Kawontenanipun*. Pada Tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Mas Pakungwati Putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis. Sejak saat itu, Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Carbon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagaimana lazimnya yang biasa dilakukan, Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1482 Masehi setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sulatan Carbon, dibuatlah maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga rela berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran.



Peristiwa merdekanya Cirebon yang keluar dari kekuasaan Pajajaran, dicatat dalam sejarah tanggal *Dwa Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala*, yang bertepatan dengan 12 Shafar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi dan kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon. Saat ini, Kabupaten Cirebon yang beribu kota di Sumber dipimpin oleh Bupati Sunjaya Purwadisastra dan Wakil Bupati Tasiya Soemadi. Ketua DPRD adalah Mustofa.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat dari sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Posisi geografisnya cukup strategis karena dilintasi jalur pantai utara Jawa yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung dan kota-kota Priangan Timur ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya. Kabupaten Cirebon terletak di antara 108° 40' - 108° bujur timur dan 6° 30' - 7° 00' lintang selatan. Jarak terjauh arah barat-timur sepanjang 54 km dan utara-selatan 39 km dengan luas wilayah 990,36 km<sup>2</sup> meliputi 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan dengan ibu kota kabupaten di Sumber. Adapun batas wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

**Sebelah utara** berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa;

**Sebelah selatan** berbatasan dengan Kabupaten Kuningan;

**Sebelah timur** berbatasan dengan Kabupaten Brebes;

**Sebelah barat** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa potensi wilayah Kabupaten Cirebon adalah pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata (Belawa, Situ Sedong, Banyu Panas Palimanan, Plangon).

## - KABUPATEN GARUT -

### SEJARAH



Sejarah Kabupaten Garut berawal pada 16 Februari 1813 ketika Letnan Gubernur di Indonesia, Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Kemudian, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (*Marantha*), seorang panitia "*kakarut*" atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut "*ngabaladah*" atau membenahi tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya "Mengapa berdarah?", Orang yang tergores menjawab, tangannya *kakarut*. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata *kakarut* dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "*gagarut*". Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan "Ki Garut" dan telaganya dinamai "*Ci Garut*". Dengan ditemukannya *Ci Garut*, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut.

Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan. Tahun 1963, Hari Jadi Garut diperingati setiap tanggal 15 September, berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Sejarah yang mengacu tanggal 15 September 1813 tersebut tertulis di jembatan Leuwidaun sebelum direnovasi. Namun, keyakinan masyarakat terhadap dasar pengambilan hari jadi Garut pun berubah. Dalam PERDA Kabupaten DT II Garut No. 11 Tahun 1981 tentang Penetapan Hari Jadi Garut yang diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 30 Januari 1982, dinyatakan bahwa Hari Jadi Garut dipandang lebih tepat pada tanggal 17 Maret 1813. Saat ini, Kabupaten Garut dipimpin oleh Bupati Rudy Gunawan, Wakil Bupati Helmi Budiman. Ketua DPRD adalah Ade Ginanjar.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6°56'49"-7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8"-108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudera Indonesia;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Garut merupakan daerah penyangga dan *hitterland* bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Ibu kota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, dan Gunung Guntur.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan, Pariwisata (Paragliding, Curug Cimandi Racun, Makam Jafar Umar Sidik, Cipanas dan Pantai Santolo).

## - KABUPATEN KUNINGAN -

### SEJARAH

Pada mulanya, Kerajaan Kuningan diperintah oleh seorang raja bernama Sang Pandawa atau Sang Wiragati. Raja ini memerintah pada zaman pemerintahan Sang Wretikandayun di Galuh (612-702 M). Berdasarkan tradisi lisan, sekitar abad 15 Masehi di daerah Kuningan sekarang dikenal dua lokasi yang mempunyai kegiatan pemerintahan yaitu Luragung dan Kajene. Pusat pemerintahan Kajene terletak sekarang di Desa Sidapurna Kecamatan Kuningan. Saat itu, Luragung dan Kajene bukan lagi sebuah kerajaan tapi merupakan *buyut haden*. Masa ini, dimulai dengan tampilnya tokoh Arya Kamuning, Ki Gedeng Luragung dan kemudian Sang Adipati Kuningan sebagai pemipun daerah Kajene, Luraung dan kemudian Kuningan.



Mereka secara bertahap di bawah kekuasaan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Djati (salah satu dari sembilan wali, juga penguasa Cirebon). Terdapat beberapa versi tokoh Adipati Kuningan. Versi pertama Sang Adipati Kuningan adalah putera Ki Gedeng Luragung (unsur lama), namun kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Djati (unsur baru). Atas prakarsa Sunan Gunung Djati dan istrinya yang berdarah Cina Ong Tin Nio yang sedang berkunjung ke Luragung, Suranggajaya diangkat anak oleh mereka. Tetapi pemeliharaan dan pendidikannya dititipkan pada Arya Kamuning yang dikabarkan tidak memiliki keturunan. Akhirnya Suranggajaya diangkat menjadi adipati oleh Susuhunan Djati (Sunan Gunung Djati) menggantikan bapak asuhnya. Penobatan ini dilakukan pada tanggal 4 Syura (Muharam) Tahun 1498 Masehi. Penanggalan tersebut bertepatan dengan 1 September 1498 Masehi. Sejak tahun 1978, hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan sampai sekarang. Kabupaten Kuningan saat ini dipimpin oleh Bupati Utje Ch. Hamid Suganda dan Wakil Bupati Acep Purnama. Ketua DPRD adalah Rana Suparman.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat  $108^{\circ} 23' - 108^{\circ} 47'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 47' - 7^{\circ} 12'$  Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat  $6^{\circ} 45' - 7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ} 20' - 108^{\circ} 40'$  Bujur Timur. Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat, yang berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kuningan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah);
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap;
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata (Telaga Remis, Taman Wisata Alam Linggarjati, Waduk Darma, Curug Sidomba berlokasi di kaki Gunung Ciremai).

## - KABUPATEN MAJALENGA -

### SEJARAH



Mataram berpengaruh besar terhadap Majalengka karena banyak orang Mataram yang tidak sempat kembali ke tempat asalnya menetap di Majalengka. Abad ke-XVII merupakan bagian dari peristiwa pertempuran Ranga Gempol yang berusaha membendung pasukan Mataram ke wilayah Priangan. Saat itu, wilayah Priangan akan diserahkan kepada VOC (1677). Pasukan Ranga Gempol mundur ke Indramayu dan Majalengka. Majalengka waktu itu masuk kekuasaan Sunan Girilaya. Pada saat itu, daerah Majalengka diserahkan kepada Sunan tersebut sebagai pengganti Putri Harisbaya yang dibawa lari dari Keraton Cirebon ke Sumedang. Tahun 1684, Cirebon diserahkan Mataram kepada VOC, maka secara otomatis Majalengka masuk daerah VOC. Tanggal 5 Januari tahun 1819, berdirilah Keresidenan Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, Raja Cola, Bangawan Wetan, Maja dan Kuningan. Selanjutnya, Kabupaten Maja atau Kabupaten Sindangkasih menjadi Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka sejak tahun 1819 sampai sekarang telah mengalami 22 kali masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati/Kepala Daerah. Saat ini, Kabupaten Majalengka beribu kota di Majalengka dan dipimpin oleh Bupati Sutrisno dan Wakil Bupati Karna Sobahi. Ketua DPRD adalah Tarsono D Mardiana.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Majalengka berada pada ketinggian 19 – 857 m di atas permukaan laut. Sebagian besarnya merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 500 – 857 m di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan kabupaten seluas 1204,24 km<sup>2</sup> yang meliputi 23 kecamatan mempunyai tanah yang subur. Kabupaten ini berbatasan dengan:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa potensi wilayah di Kabupaten Majalengka adalah kehutanan dan perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata (Kolam Renang Sang Raja, Curug Muara Jaya, Curug Tonjong, Situ Sangiang, Talaga Herang, Taman Buana Puri, Hutan Lindung Prabu Siliwangi dan Kolam Emas Situ Cipadung, Sirkuit Terpadu Gagaraji dan Museum Talaga Manggung).

## - KABUPATEN SUMEDANG -

### SEJARAH

Pada mulanya, Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Raja Galuh. Didirikan oleh Prabu Geusan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama adalah Kerajaan Tembong Agung (Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur), dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Pada masa zaman Prabu Tajimalela, namanya diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Sumedang Larang (Sumedang berasal dari Insun Medal/Insun Medangan yang berarti aku dilahirkan, dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya).



Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno khas di Pulau Jawa, yaitu terdapat Alun-alun sebagai pusat yang dikelilingi Mesjid Agung, rumah penjara dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun, terdapat bangunan yang bernama Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922 yang dibuat oleh Pangeran Siching dari Negeri Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Aria Soeriaatmadja atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Kabupaten Sumedang. Lingga diresmikan pada tanggal 22 Juli 1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. Dr. Dirk Fock. Sampai saat ini, Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang dan setiap 22 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang yang beribu kota di Sumedang sekarang dipimpin oleh Bupati Ade Irawan dan Wakil Bupati Eka Setiawan. Ketua DPRD adalah Irwansyah Putra.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha. Berikut adalah batas wilayah administratifnya:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Garut;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung dengan ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sebagian besar Wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.667 m) berada di Utara Perkotaan Sumedang.

### POTENSI WILAYAH

Makanan Khas Kabupaten Sumedang adalah Tahu Sumedang, Ubi Cilembu, Salak Cipondoh, Sawo Citali, dan Sale Pisang.

Potensi Pariwisata diantaranya adalah Cipanas Sekarwangi, Kampung Toga, Gunung Kunci (Gua Gunung Kunci merupakan tempat rekreasi dengan pemandangan alam yang indah), Curug Sindulang, dan Museum Prabu Geusan Ulun).

## - KABUPATEN TASIKMALAYA -

### SEJARAH



Pada abad ke VII sampai abad ke XII, diketahui terdapat Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang. Hal ini berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakarta dengan ibu kota Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading. Berikutnya adalah periode pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung sekitar 10 tahun. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakarta diangkat menjadi Bupati Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibu kota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “*negara*” disebut Sukapura.

Pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814), ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII, ibu kota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupati. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung. Saat ini, Kabupaten Tasikmalaya yang beribu kota di Singaparna dipimpin oleh Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E dan Wakil Bupati Ade Sugianto, SIP. Ketua DPRD adalah Drs. Ruhimat, M.Pd.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas 2,563.35 km persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan:

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Garut;

**Sebelah Barat Daya s.d. Barat Laut** berbatasan dengan dataran tinggi Pegunungan Galunggung;

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;

**Sebelah Tenggara** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudera Hindia;

**Sebelah Timur Laut** berbatasan dengan Kota Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki bentangan terjauh dari utara ke selatan sekitar 75 Km dan sekitar 56,25 Km dari timur ke barat. Curah hujan tahunan rata-rata sebanyak 2,072 mm.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu Bisnis Kelautan, Agribisnis, Pertambangan (Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi bahan galian dan mineral industri), Usaha Kecil & Menengah, Pariwisata (Gunung Galunggung, Kampung Naga dan Pantai Karangtawulan).

## - KOTA BANJAR -

### SEJARAH

Pembentukan Kota Banjar tidak terlepas dari sejarah Pemerintah Kabupaten Ciamis. Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai berikut:

- Banjar sebagai ibukota kecamatan, dari tahun 1937 sampai tahun 1940.
- Banjar sebagai ibukota kewadanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992.
- Banjar sebagai kota administratif, dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Februari 2003.
- Banjar sebagai kota, sejak tanggal 21 Februari 2003.



Semakin pesatnya perkembangan tuntutan aspirasi masyarakat agar Banjar Kota Administratif segera ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota dan sejalan dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan Pejabat Walikota Banjar dijadikan sebagai Hari jadi Kota Banjar. Saat ini, Kota Banjar dipimpin oleh Walikota Ade Uu Sukaesih dan Wakil Walikota Darmadji Prawirasetia. Ketua DPRD adalah Dadang R. Kalyubi.

### GEOGRAFIS

Luas Wilayah Kota Banjar sebesar 13.197,23 Ha, terletak diantara  $07^{\circ}19' \text{ } \phi$  -  $07^{\circ}26' \text{ } \phi$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ}26' \text{ } \phi$  -  $108^{\circ}40' \text{ } \phi$  Bujur Timur. Kota Banjar mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap;
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

### POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah di Kota Banjar meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, penggalian dan industri tanpa migas. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu potensi wilayah di Kota Sukabumi, yang terdiri dari:

- Potensi kesenian, yang mencakup Calung, Kuda Lumping, Degung, Kacapi Suling, Wayang Kulit, Reog, Wayang Golek, dan Hadroh;
- Potensi wisata, yaitu Situ Mustika, Situs Pulo Majeti, dan Situ Kokoplak.

## - KOTA CIREBON -

### SEJARAH



Menurut Manuskrip *Purwaka Caruban Nagari* pada abad XIV di pantai Laut Jawa, terdapat sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada saat itu, banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjajaran). Di pelabuhan ini juga terlihat aktifitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit, menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru, diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar *Kuwu Cerbon*.

Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirim upeti kepada Raja Galuh. Raja Galuh menjawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menundukkan Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh dan ia pun keluar sebagai pemenang. Atas hal tersebut, berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan raja bergelar Cakrabuana. Saat ini, Kota Cirebon dipimpin oleh Walikota Nasrudin Aziz. Ketua DPRD adalah Edi Suripno.

### GEOGRAFIS

Kota Cirebon merupakan Kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat dan terletak pada jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33 derajat Bujur Timur dan 6.41 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 24 – 33 derajat celcius dan bercurah hujan 2.751 mm/tahun. Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah sebesar 37.358 Km<sup>2</sup>. Kota Cirebon memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Sungai Kedung Pane;
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Sungai Kalijaga;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Laut Jawa.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa potensi wilayah di Kota Cirebon adalah:

- Potensi Geografi

Wilayah geografi Kota Cirebon berbentuk dataran rendah dengan fotografinya datar (*flat*). Menurut data potensi desa tahun 2003, beberapa Kecamatan memiliki letak geografis berupa pesisir pantai (*Coast*) yaitu Kecamatan Lemahwungkuk dan Kejaksan, sedangkan untuk tiga Kecamatan lainnya letak geografisnya berupa daerah dataran (*Plain*).

- Potensi Pariwisata

Obyek wisata di Kota Cirebon diantaranya adalah Keraton Kasepuhan (Keraton Kasepuhan sebelumnya bernama Keraton Pakungwati), Taman Ade Irma Suryani, Gua Sunyaragi, dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

## - KOTA TASIKMALAYA -

### SEJARAH

Berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui PP Nomor 22 Tahun 1976. Berkat perjuangan Bupati H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. bersama tokoh - tokoh masyarakat lainnya.

Melalui proses panjang, akhirnya Kota Tasikmalaya diresmikan pada 17 Oktober 2001 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2001 di bawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim. Kota Tasikmalaya diresmikan semua pihak dan *stakeholder*. Ibu kota Tasikmalaya adalah Tasikmalaya. Saat ini, Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Walikota Budi Budiman dan Wakil Walikota Dede Sudrajat. Ketua DPRD adalah Agus Wahyudin.



### GEOGRAFIS

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32" LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung, ±105. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis (dengan batas sungai Citanduy);

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kab. Tasikmalaya;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kab. Tasikmalaya (batas sungai Ciwulan).

### POTENSI WILAYAH

Yaitu Penduduk, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Pariwisata (Situ Gede, Makam Syekh Abdul Gharib).

## - KABUPATEN BEKASI -

### SEJARAH



Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmains, yang menentang keberadaan RIS-Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Pada 17 Februari 1950, diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang. Rakyat Bekasi menyampaikan tuntutan, yaitu:

- Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia.
- Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia.
- Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia.
- Menuntut Pemerintah agar Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.

Upaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Pengajuan usul dilakukan tiga kali hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, Mohammad Hatta menyetujui penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi "Kabupaten Bekasi". Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Saat ini, Kabupaten Bekasi yang beribu kota di Cikarang dipimpin oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Rohim Mintareja. Ketua DPRD adalah Eka Supriatmadja.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Bekasi berada di bagian utara Jawa Barat, terletak 1060 48' 28" BT 1070 27' 29" dan 6 0 10' 6" LS. Batas-batas wilayah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Karawang;
- Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Jawa ;
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu industri dan pergudangan, pemukiman dan properti, pariwisata (Pantai Muara Gembong, Pantai Muara Beting, dan Pantai Muara Bendera), perdagangan dan jasa, pertambangan minyak dan gas..

## - KABUPATEN BOGOR -

### SEJARAH

Terdapat berbagai pendapat tentang asal mula nama Bogor. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Baghar atau Baqar yang berarti sapi, dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor, yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri yang diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah, dikatakan bahwa pada 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis *Hoofd Van de Negorij Bogor*, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kota Bogor. Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan.



Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan PP Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu, dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Bogor. Saat ini, Kabupaten Bogor yang beribukota di Cibinong dipimpin oleh Bupati Nurhayanti. Ketua DPRD adalah Ade Ruhandi.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota RI dan secara geografis mempunyai luas sekitar 2.301,95 Km<sup>2</sup> dan terletak antara 6.190 lintang selatan dan 10601' -1070103' bujur timur. Wilayah ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Prov. Banten);
- Sebelah Barat Daya** berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Karawang;
- Sebelah Timur Laut** berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Tenggara** berbatasan dengan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Tengah** berbatasan dengan Kotamadya Bogor.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa obyek wisata di Kabupaten Bogor diantaranya adalah Perkebunan Teh Cianten, Permandian Air Panas Ciseeng, Taman Safari Indonesia (TSI), Curug Cilember, dan Wisata Gunung Bunder.

## - KABUPATEN CIANJUR -

### SEJARAH



Sejarah Kabupaten Cianjur sangat sedikit diketahui. Akan tetapi menurut riwayat, daerah Kabupaten Cianjur dahulunya adalah termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan masyarakat Cianjur yang sama dengan masyarakat pada jaman Kerajaan Pajajaran yang banyak mengenal kebudayaan hindu. Asal usul Kabupaten Cianjur diketahui setelah masuk pengaruh Islam ke Cianjur dari Kesultanan Banten sekitar abad XV. Bupati pertama Cianjur bernama Wiratanu I yang memerintah sekitar abad XVII, berpusat di Cikidul-Cikalong Kulon 20km sebelah utara Kabupaten Cianjur sekarang. Pusat pemerintahan dipindahkan oleh Bupati Wiratanu II ke tepi sungai dan jalan raya yang telah dibuat oleh Daendels antara Anyer - Panarukan, yaitu Kota Cianjur sekarang.

Kota Cianjur menjadi Kota Keresidenan Priangan pada masa Raden Kusumah Diningrat dengan wilayah meliputi Pelabuhan Ratu sebelah barat, Sungai Citanduy dengan barisan Gunung Halimun, Mega Mendung, Tangkuban Perahu sebelah timur, dan Samudra Indonesia sebelah selatan. Kabupaten Cianjur beribu kota di Cianjur dan saat ini dipimpin oleh Bupati Tjetjep Muchtar Soleh dan Wakil Bupati Suranto. Ketua DPRD adalah Yadi Mulyadi.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Cianjur berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Samudra Hindia;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.

Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit.

Dari luas wilayah Kabupaten Cianjur sebesar 350.148 hektar, pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha (23,71 %) berupa hutan produktif dan konservasi, 58,101 Ha (16,59 %) berupa tanah pertanian lahan basah, 97.227 Ha (27,76 %) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan, 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan penggembalaan/pekarangan, 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak/ kolam, 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman/pekarangan, dan 22.483 Ha (6,42 %) berupa penggunaan lain-lain.

### POTENSI WILAYAH

Yaitu agribisnis/ agromarine bisnis, pariwisata (Gunung Gede, Makam Dalem Cikundul, Taman Cibodas, Taman Bunga, dan Istana Presiden Cipanas), serta kerajinan rumah tangga.

## - KABUPATEN INDRAMAYU -

### SEJARAH

Menurut Tim Panitia Peneliti Sejarah Kabupaten Indramayu, hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527 dan telah disahkan pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Indramayu pada 24 Juni 1977 serta ditetapkan dalam Perda Kabupaten Daerah Indramayu Nomor 02 Tahun 1977 tentang Penetapan Hari Jadi Indramayu. Dalam Perda tersebut, dinyatakan bahwa hari jadi Indramayu ditetapkan pada 7 (tujuh) Oktober 1527 Masehi atau hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharam 934 H. Dalam menentukan hari jadi, tim peneliti sejarah Indramayu berpegang pada sebuah peninggalan dan berdasar beberapa fakta sejarah yang ada, yaitu prasasti, penulisan-penulisan masa lalu, benda-benda purbakala/benda pusaka, legenda rakyat, serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Babad Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Aria Wiralodra yang berasal dari Bagelen Jawa Tengah, putera Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat dan bertapa. Saat ini, Kabupaten Indramayu yang beribu kota di Indramayu dipimpin oleh Bupati Hj. Anna Sophanah dan Wakil Bupati H. Supendi. Ketua DPRD adalah Taufik Hidayat.



### GEOGRAFIS

Secara geografis, Kabupaten Indramayu terletak pada posisi 107° 52' - 108° 36' BT dan 6° 15' - 6° 40' LS dengan batas wilayah:

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Subang;

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Jawa ;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Luas wilayahnya sebesar 204,011 ha atau 2.040.110 km, dengan panjang pantai 114,1 km membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang.

### POTENSI WILAYAH

Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial, karena kekayaan alam, tradisi, seni dan budaya serta sejarah. Beberapa potensi pariwisata telah dikembangkan, namun masih banyak yang belum tergarap secara maksimal. Obyek Wisata di Kabupaten Indramayu terdiri dari wisata alam (Pulau Biawak, Pantai Tirtamaya, Pantai Glayem, Pantai Balongan Indah, Pantai Eretan, Situ Bojong Sari, Situ Bolang, Situ Brahim, Waduk Cipancuh, dan Koloni Kera Banjar), wisata agro, wisata rohani (Wisata Rohani Ma'had Al Zaetun).

## - KABUPATEN KARAWANG -

### SEJARAH



Peninggalan Situs Batujaya dan Situs Cibuaya menunjukkan bahwa di wilayah Karawang terdapat pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa Kerajaan Tarumanagara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Sunda runtuh, maka Karawang terbagi menjadi dua. Menurut Cerita Sajarah Banten, Sunan Gunungjati membagi Karawang menjadi dua bagian yaitu sebelah timur masuk ke dalam wilayah Cirebon dan sebelah barat menjadi wilayah Kesultanan Banten. Karawang memiliki pemerintahan sendiri dimulai sejak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Panembahan Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik pada 14 September 1633. Tanggal ini menjadi hari jadi Kabupaten Karawang.

Pada masa menjelang Kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengasdengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Moch. Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kabupaten Karawang yang beribu kota di Karawang dipimpin oleh Bupati Ade Swara dan Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana. Ketua DPRD adalah Toto Suripto.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Karawang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor;

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Jawa;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Subang;

**Sebelah Tenggara** berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta ;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66 persen dan kelembaban nisbi 80 persen. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/tahun. Pada bulan Januari sampai April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara.

Kecepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 – 7 jam.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa potensi wilayah di Kabupaten Karawang adalah potensi tanaman padi, potensi palawijaya dan hortikultura, sumber daya perikanan, serta potensi pariwisata (Obyek Wisata Budaya berupa Situs, Obyek Wisata Sejarah Tugu Proklamasi, Obyek Wisata Tirta, Obyek Wisata Alam, dan Obyek Wisata Keagamaan).

## - KABUPATEN PANGANDARAN -

### SEJARAH

Pada awalnya, desa Pananjung Pangandaran dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari Suku Sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Di Pantai Pangandaran, terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung. Tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam Bahasa Sunda disebut *andar*. Setelah beberapa lama, banyak yang berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut *Pangandaran*.



Pangandaran berasal dari dua buah kata “*Pangan*” dan “*Daran*”, yang artinya “Makanan” dan “Pendatang”. Jadi, Pangandaran berarti “Sumber Makanan Para Pendatang”. Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan. Ibu kotanya adalah Parigi. Saat ini, Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh Penjabat Bupati Daud Achmad. Ketua DPRD adalah Iwan M. Ridwan.

### GEOGRAFIS

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat.

### POTENSI WILAYAH

Pariwisata di Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah:

- Pantai Pangandaran,
- Pantai Karapyak,
- Pantai Karangnini,
- Pantai Lembah Putri,
- Pantai Batuhiu,
- Pantai Batukaras,
- Pantai Madasari,
- Pemandian Alam Citumang (*Green Valley*),
- Cukang Taneuh (*Green Canyon*),
- Muara Karang,
- Gua Donan.

## - KABUPATEN PURWAKARTA -

### SEJARAH



Asal-usul dan arti nama Purwakarta terdiri dari beberapa versi. Versi umum menyatakan nama itu berasal dari kata *purwa* dan *karta* dalam bahasa Sanskerta. *Purwa* berarti yang pertama, *karta* berarti aman tenteram dan tertib atau ramai. Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai tahun 1949. Pada 29 Januari 1949 melalui Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua menjadi Karawang Bagian Timur yaitu Kabupaten Purwakarta dengan beribu kota di Subang, dan Karawang Bagian Barat yaitu Kabupaten Karawang. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, diatur penetapan Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Purwakarta. Pada tahun 1968 berdasarkan UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dan SK Wali Negeri Pasundan, diubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 1989, telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta, Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered, Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah. Setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada 1 Januari 2001, serta melalui Perda No. 22 Tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.

Saat ini Kabupaten Purwakarta yang beribu kota di Purwakarta dipimpin oleh Bupati Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Dudung B. Supardi. Ketua DPRD adalah Sarif Hidayat.

### GEOGRAFIS

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,72 km<sup>2</sup>. Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107o30' – 107o40' BT dan 6o25' – 6o45' LS. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur ;
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Letak geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan raya negara/provinsi, jalan tol dan jalan kereta api.

### POTENSI WILAYAH

Beberapa obyek wisata di Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah wisata alam (Waduk Jatiluhur, Danau Cirata, Situ Wanayasa, Sumber Air Panas Ciracas, Air Terjun Curug Cipurut, Gunung Parang, Gua Jepang berlokasi berlokasi ±28 Km dari kota Purwakarta, dan Situ Buleud), wisata budaya, wisata ziarah, wisata kuliner (Sate Maranggi).

## - KABUPATEN SUBANG -

### SEJARAH

Kabupaten Subang mengalami masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Hal ini berimbas dengan didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang yang mayoritas anggotanya menjadi anggota TNI. Tahun 1946, Karésidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Bulan Desember 1946, Karésidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Bulan Desember 1946, diangkat Kosasih Purwanegara menjadi residen. Tak lama kemudian, diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen. Tanggal 26 Oktober 1947, Residen Kosasih Purwanegara meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan Purwakarta 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke wilayah perjuangannya. Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal 5 April 1948 di Cimanggu, Desa Cimenteng. Di bawah pimpinan Karlan, rapat memutuskan:



- Wakil Residen Mukmin ditunjuk menjadi Residen yang berkedudukan di daerah gerilya Purwakarta.
- Wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Danta Gandawikarma.
- Wilayah Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang Barat dengan bupati pertamanya Syafei.
- Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya Subang.

Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan DPRD No. : 01/SK/DPRD/1977.

Saat ini, Kabupaten Subang yang beribu kota di Subang dipimpin oleh Bupati Ojang Sohandi dan Wakil Bupati Imas Aryumningsih. Ketua DPRD adalah Beni Rudiono.

### GEOGRAFIS

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah seluas 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terletak di antara 107° 31' sampai dengan 107° 54' Bujur Timur dan 6° 11' sampai dengan 6° 49' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Subang adalah:

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang;

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu;

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Jawa.

### POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah Kabupaten Subang terdiri dari pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan darat, perikanan laut, pertambangan, energi, dan pariwisata (Air Panas Ciater, *Capolaga Adventure Camp*, *Ciater Spa Resort*, Kawah Tangkuban Perahu).

## - KOTA BEKASI -

### SEJARAH



Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibu kota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah), dan 95 desa. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. H Juanda). Pada tahun 1982 saat Bupati dijabat oleh H. Abdul Fatah, Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan sesuai PP Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982–1988). Perkembangan Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat, sehingga status Kota Administratif Bekasi kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang Kota) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 dengan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

Saat ini Kota Bekasi di dipimpin oleh Walikota Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Ahmad Syaikh. Ketua DPRD adalah Tumai.

### GEOGRAFIS

Secara geografis, kota Bekasi berada pada ketinggian 19 m di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta berbatasan dengan:

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Jakarta Timur;

**Sebelah Utara dan Timur** berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Bogor;

**Sebelah Barat Daya** berbatasan dengan Kota Depok.

Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50 % sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90 % telah menjadi kawasan perumahan, 4 % telah menjadi kawasan industri, 3 % telah digunakan untuk perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya.

### POTENSI WILAYAH

Kota Bekasi menyimpan potensi wisata yang menarik, yaitu Taman Buaya, Padang Golf Jababeka, *Waterboom* Cikarang, Saung Ranggon, Bumi Perkemahan Karang Kitri, Kota Deltamas, dan Gedung Juang 45.

## - KOTA BOGOR -

### SEJARAH

Kota Bogor mempunyai sejarah pemerintahan yang panjang sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Sesuai bukti-bukti yang ada, seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggingtung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan, diketahui bahwa Pakuan sebagai Ibu kota Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatannya tepat pada 3 Juni 1482. Hari tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Bogor sejak tahun 1973 oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.



Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor. Setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor diubah menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1957, nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor sesuai dengan UU Nomor. 1 Tahun 1957. Melalui UU Nomor 18 tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor. Kota Bogor yang beribu kota di Bogor saat ini dipimpin oleh Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman. Ketua DPRD adalah Untung W. Maryono.

### GEOGRAFIS

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS. Kedudukan geografis Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan sangat dekat dengan ibu kota Negara. Ini merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kelembaban udara di Kota Bogor sebesar 70 % dengan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm. Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha. Kota Bogor ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

**Sebelah Utara** berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

**Sebelah Timur** berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.

**Sebelah Barat** berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.

**Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

### POTENSI WILAYAH

Tempat wisata di Kota Bogor yaitu Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, Museum Etnobotani, Museum Zoologi, Museum Tanah, Plaza Kapten Muslihat, dan Situ Gede.

## - KOTA DEPOK -

### SEJARAH



Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Kabupaten Bogor. Pada tahun 1981, Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan PP Nomor 43 tahun 1981 yang diresmikan 18 Maret 1982, terdiri dari 3 Kecamatan dan 17 Desa. Selama kurun waktu 17 tahun, Kota Administratif Depok berkembang pesat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan, semua desa berganti menjadi kelurahan sehingga akhirnya Depok terdiri dari 3 kecamatan dan 23 kelurahan.

Sesuai UU No. 15 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II dan diresmikan pada 27 April 1999 bersamaan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok, Drs. H. Badrul Kamal, yang saat itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Depok dijadikan landasan yang bersejarah sebagai hari jadi Kota Depok. Saat ini, Kota Depok yang beribu kota di Depok dipimpin oleh Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Walikota Idris Abdul Shomad. Ketua DPRD adalah Hendrik Tangke Alo.

### GEOGRAFIS

Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" Lintang Selatan dan 106o 43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km<sup>2</sup>. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane, serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu, terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

### POTENSI WILAYAH

Salah satu potensi pertanian yang cukup potensial di Kota Depok adalah Belimbing Dewa. Buah tersebut merupakan karya petani penangkar Depok, H. Usman Mubin. Belimbing juga menjadi sebagai ikon Kota Depok. Objek wisata di Kota Depok adalah Masjid Kubah Emas dan Situ Danau Pengasinan.

Laporan Tahunan 2015 ini dapat menjadi informasi singkat tentang keberadaan sumber daya, output yang telah dihasilkan, dan perjalanan yang telah dilalui keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015. Realisasi 2015 yang masih belum tercapai sebagaimana yang telah ditargetkan dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kapasitas di tahun mendatang.

**PENUTUP**

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	65%	58,08%	89,36
		1.2	Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian Negara	65%	50,%	76,92
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	87	84	97
		2.2	Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan	16	14	88
		2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%	100%	100
		2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	95%	91,67%	96,49
		2.5	Pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan	100%	100%	100
		2.6	Persentase Pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit	54%	47,46%	87,88
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Ditama EPP	1	1	100
4	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	4.1	Jumlah laporan pemantauan kerugian Negara yang diterbitkan	54	54	100
		4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara	100%	100%	100
5	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	5.1	Jam pelatihan rata-rata per pegawai	40 jam	62,96 jam	105
		5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	90%	73,08%	81,20
6	Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders	6.1	Jumlah media relation yang dilaksanakan	3	4,7	105
		6.2	Tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data	-	-	-
7	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	7.1	Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara optimal	100%	100%	100
		7.2	Persentase instalasi Agent Konsolidator (AK)	-	-	-
		7.3	Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK)	100%	22,22%	22,22
8	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana	8.1	Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana	95%	96,81%	101,99
9	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat pemanfaatan anggaran	90%	93,13%	103,48



# KALEIDOSKOP 2015





# HUT BPK







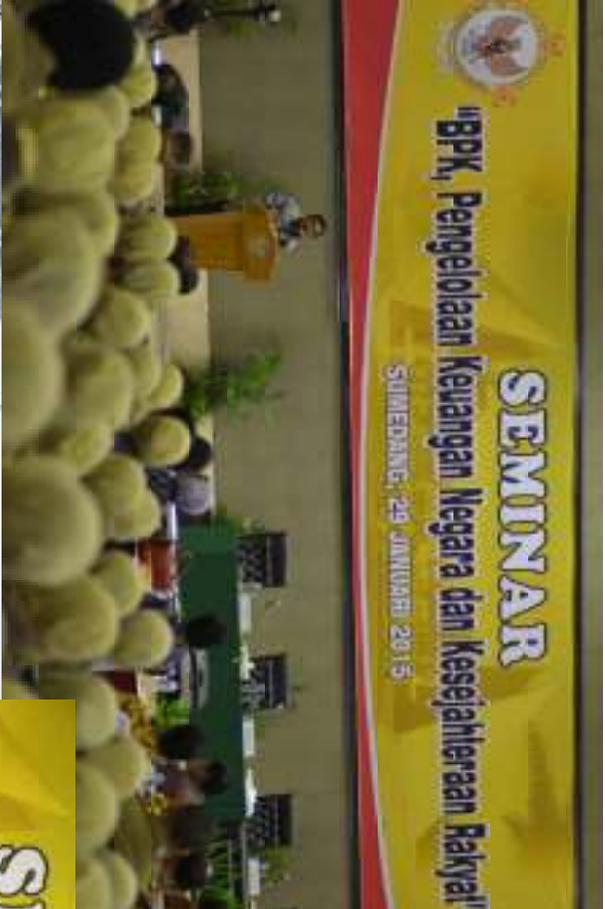
# Pisah Sambut Kepala Perwakilan





## Media Relations





**Kunjungan Kerja. Seminar.**





## Sosialisasi. & Workshop





**Penyerahan laporan**





Bandung, 29 Desember 2015



Hasil Pemeriksaan





**Pemberian Keterangan Ahli**



**Peresmian Poli Gigi**



**Stock Shots**



**Buka Puasa Bersama dan Perpisahan**



**Dzuhur Berjamaah**



---

Kabupaten Bekasi  
Kota Sukabumi  
Provinsi Jawa Barat  
Kabupaten Sukabumi  
Kabupaten Pangandaran  
Kabupaten Tasik  
Kota Cimahi  
Kota Banjar  
Kabupaten Majalengka  
Kota Tasikmalaya  
Kabupaten Subang  
Kabupaten Bandung Barat  
Kabupaten Bandung  
Kabupaten Karawang  
Kota Cirebon  
Kota Bogor  
Kota Bekasi  
Kabupaten Sumedang  
Kabupaten Cirebon  
Kota Depok  
Kabupaten Bogor  
Kabupaten Cianjur  
Kabupaten Purwakarta  
Kabupaten Indramayu  
Kabupaten Ciamis  
Kabupaten Kuningan  
Kabupaten Garut

---

**BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**JL. MOCH TOHA NO. 164**

**TELP.(022) 5207294 / (022) 5207295 FAX.(022) 5207898**

**BANDUNG - JAWA BARAT**

**bandung.bpk.go.id**